

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Ateng Syafrudin, Suprin Na'a, 2010, *Republik Desa*, Bandung, Alumni.

Didik Sukriono, 2010, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Malang, Setara Press.

H. Abdul Manan, 2016, *Politik Hukum (Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat)*, Jakarta, Prenadamedia Group.

HAW. Widjaya, 2003, *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Jimly Asshiddiqie, 2006, “*Perihal Undang-Undang*”, Cetakan Pertaa, Jakarta, Konstitusi Press.

Moch. Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang, Setara Press.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2017, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang, Setara Press.

R.Bintarto, 1986, *Desa-Kota*, Bandung, Alumni.

R. Bintarto, 1989, *Dalam Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Rudy, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah Prespektif Konstituionalisme Indonesia*, Bandar Lampung, Indepth.

Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Sumber Saparin, 1986, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Taliziduhu Ndrama, 1991, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Bumi Aksara.

Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik*, Jakarta, Rajawali Pers.

Yusnani Hasyimzoen dkk, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Rajawali Pers.

Jurnal:

Ardhiwinda Kusumaputra dkk, 2015, “Model Penguanan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Struktur Pemerintahan Desa”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Vol.4, No.12.

Ellya Rosana, 2016, “Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal TAPIs*, Vol.12, No.1.

Erga Yuhandra, 2016 “Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi”, *Jurnal Unifikasi*, Vol. 3, No. 2.

Fauzan Khairazi, 2015, “Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Inovatif*, Vol.8, No.1.

Fauzi Iswahyudi, 2016, “Keikutsertaan Perancang Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jurnal De Lega Lata*, Vol.1, No.1.

Ferry Irawan Febriansyah, 2016, “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Perspektif*, Volume.21, No.3.

Khelda Ayunita, 2016, “Pengujian Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Jurisprudentie Universitas Indonesia Timur Makassar*, Vol.3, No.2.

Muliati, 2019, “Administrasi Pemerintahan Daerah (Wujud Pemerintahan Demokrasi Dalam Otonomi Daerah)”, *Jurnal Meraja*, Vol. 2, No. 2.

Saiful, 2014, “Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Universitas Tadulako*, Vol.2, Edisi 6.

Sugiman, 2018, “Pemerintahan Desa”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol.7, No.1.

Syahbudin Syahbudin dkk, 2018, “Model Harmonisasi Hubungan Wewenang Antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa”, *Jurnal Halu Oleo Law Review Universitas Halu Oleo Kendari*, Vol.2, No.2.

Peraturan Perundang-Undangan:

R.I., *Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014*, tentang “Desa”.

R.I., *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014*, tentang “Pemerintahan Daerah”.

R.I., *Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011*, tentang “Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.

R.I., *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun2016*, tentang “Badan Permusyawaratan Desa”.

R.I., *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun2014* tentang “Pedoman Teknis Peraturan di Desa”.

R.I., *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2007* tentang “Badan Permusyawaratan Desa”

R.I., *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2016* tentang “Badan Permusyawaratan Desa”

R.I., *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017* tentang “Pedoman Pembentukan Produk Hukum Di Desa”.